

BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN APARATUR PEMERINTAH PUPR TERHADAP PENANGANAN KERUSAKAN JALAN DI CIPTA KARYA KOTA PEKANBARU

Anne Shofia Pratiwi, Intan Septi Aulia, Tesa Amanda
Jurusan Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Riau
e-mail: intansepti.aulia@icloud.com

Abstrak

Infrastruktur jalan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan daerah. Penanganan kerusakan jalan secara efektif dan efisien oleh pemerintah menjadi kunci untuk mendukung mobilitas masyarakat dan kelancaran aktivitas ekonomi. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran pemerintah dalam penanganan kerusakan jalan di Cipta Karya kota Pekanbaru. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kajian pustaka dengan mengkaji berbagai sumber dokumen terkait penanganan kerusakan jalan oleh pemerintah. Data-data sekunder yang digunakan berasal dari jurnal, laporan, dan berbagai publikasi ilmiah lainnya. Berdasarkan hasil identifikasi dokumen dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dalam memperbaiki kerusakan jalan di Cipta Karya Kota Pekanbaru. Pemerintah melakukan inspeksi di lokasi dan untuk proyek-proyek besar atau pekerjaan konstruksi berat, pemerintah mendelegasikan tanggung jawab kepada mitra untuk menyediakan fasilitas. Namun, Pemerintah terus memantau dan tidak melalaikan tanggung jawabnya. Kesimpulannya, meskipun pemerintah telah menjalankan perannya dengan cukup baik, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan, antara lain: (1) memperkuat pengawasan dan koordinasi dengan mitra kerja, (2) memastikan transparansi pelaporan dan akuntabilitas mitra, (3) melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan evaluasi, dan (4) meningkatkan alokasi anggaran untuk pemeliharaan dan perbaikan jalan berkala.

Kata Kunci: Kerusakan Jalan, Peran Pemerintah, Tinjauan Literature, dan Cipta Karya Kota Pekanbaru

PENDAHULUAN

Kinerja atau yang disebut juga dengan performance ialah gambaran dengan tingkat pencapaian pelaksanaan program dan kebijakan kegiatan yang ditujukan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi, yang dimasukkan ke dalam perencanaan strategis organisasi. Pemerintah kota harus memperhatikan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Memang benar, pengukuran kinerja adalah penilaian yang dilakukan oleh lembaga pemerintah terhadap kegiatan yang telah mereka lakukan berdasarkan kriteria atau standar minimum pelayanan publik yang telah ditetapkan (Uguy, n.d.). Tujuan dari pengukuran kinerja pemerintah ini yaitu untuk meningkatkan akuntabilitas karena dengan adanya pengukuran kinerja pemerintah ini suatu instansi yang dapat menghasilkan data yang jika dianalisis dengan benar akan memberikan

informasi yang akurat kepada manajemen untuk mengambil keputusan guna meningkatkan kinerja lembaga. Selain itu, pengukuran kinerja pemerintah ini juga dapat membantu manajer publik mengevaluasi hasil rencana melalui alat pengukuran keuangan dan non-keuangan. Selain itu, karena pengukuran kinerja ditingkatkan melalui penerapan penghargaan dan hukuman, sistem pengukuran kinerja pemerintah juga dapat berfungsi sebagai alat pengendalian organisasi. Jadi, pekerjaan dapat diukur dengan tiga cara: kinerja pada tugas, aktivitas, atau sejauh mana tujuan tertentu yang terkait dengan pekerjaan tercapai. Dengan kata lain prestasi kerja dapat diartikan sebagai kualitas atau kuantitas hasil yang dihasilkan oleh suatu organisasi ketika melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab organisasi tersebut.

Kebutuhan akan perjalanan yang efisien, aman, dan nyaman meningkat sebagai akibat dari aktivitas masyarakat yang semakin meningkat di jalan cipta karya. Dengan lebih banyak aktivitas yang terlibat di kehidupan sosial masyarakat, Peran jalan dalam kehidupan sosial masyarakat akan semakin penting. Jalan bukan hanya untuk memudahkan orang bergerak, tetapi juga berkontribusi pada kehidupan sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Jalan dibangun dengan pendekatan pembangunan daerah untuk mencapai perimbangan modal, pemerataan perbaikan jalan antar wilayah, dan membentuk serta memperkuat persatuan bangsa untuk menstabilkan lalu lintas jalan. Undang-undang yang sedang dibahas mengatur tentang pemeliharaan jalan dan tata cara properti. Artikel tersebut membahas berbagai jenis pemeliharaan jalan, seperti pemeliharaan terjadwal, pemeliharaan terjadwal, dan restorasi. Pasal 23 mengatur tanggung jawab pemeliharaan jalan pada tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan nasional. Sementara itu, Pasal 25 menekankan pentingnya peran masyarakat dalam pemeliharaan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ukuran keberhasilan implementasi kebijakan ini dapat dilihat dari kemajuan dan pencapaian tujuannya. Artinya, apakah tujuan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut telah tercapai atau tidak. Secara keseluruhan, undang-undang ini bertujuan untuk mengatur tanggung jawab pemeliharaan jalan di berbagai tingkatan pemerintahan, serta mendorong partisipasi masyarakat. Evaluasi terhadap proses dan hasil implementasi kebijakan ini penting dilakukan untuk menilai efektivitasnya (Nisaa et al., 2023).

Namun Kondisi birokrasi Indonesia selama ini tampaknya kehilangan kepercayaan masyarakat karena pemerintah tidak berfungsi sebagai lembaga yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah kota harus siap dan mampu untuk menyampaikan segala informasi secara transparansi dalam berbagai kegiatan dan kebijakan (Wijayanti Wening, 2023). Terutama dalam hal yang menyangkut kepentingan masyarakat seperti pembangunan dan perbaikan jalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar demi kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini merupakan tanggungjawab pemerintah Kota Pekanbaru terhadap perbaikan jalan yang sampai saat ini masih belum terlaksanakan di jalan Cipta Karya Terutama dalam hal yang menyangkut kepentingan masyarakat seperti pembangunan dan perbaikan jalan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekitar demi kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini merupakan tanggungjawab

pemerintah Kota Pekanbaru terhadap perbaikan jalan yang sampai saat ini masih belum terlaksanakan di jalan Cipta Karya. Karena hal itu membuat banyak para pengendara mengalami kecelakaan akibat lubang lubang yang sangat besar dan dalam dalam, juga sangat membahayakan masyarakat sekitar apalagi setelah hujan lebat sudah pasti jalanan banjir dan membuat pengendara tidak bisa melihat mana jalanan yang masih aman untuk dilewati, karena jalanan tidak terlihat yang disebabkan oleh banjir sehingga banyak pengendara motor yang terjatuh ke dalam genangan air tersebut.

KAJIAN PUSTAKA

Literature Review

Literature review adalah kerangka, ide, atau arahan untuk menganalisis dan mengklasifikasikan data yang dikumpulkan selama penelitian yang dilakukan. Sumber rujukan, seperti buku, jurnal, dan majalah, harus relevan, terbaru, dan sesuai dengan pustaka acuan. Tujuan dari melakukan review literature adalah untuk mendapatkan teori-teori yang dapat membantu memecahkan masalah. Teori-teori yang dikumpulkan merupakan langkah awal untuk lebih memahami masalah yang diteliti sesuai kerangka berpikir ilmiah. Salah satu hal penting yang perlu diingat saat melakukan review literature adalah menghindari kutipan pendapat pakar yang tidak melibatkan pembahasan dan pendapat kritis mereka tentang suatu topik bidang ilmu. Menganalisis, mensintesis, meringkas, dan membandingkan hasil penelitian satu sama lain adalah hal yang perlu diperhatikan dari review literatur tersebut. Literature review membantu peneliti mencapai tujuan mereka dan menguraikan metodologi penelitian. Dalam menguraikan penelitian, Anda harus menjelaskan variabel atau peubah yang digunakan, model yang digunakan, rancangan penelitian, metode sampling dan pengumpulan data, analisis data, dan metode penafsiran. Tujuannya adalah agar orang lain dapat melakukan penelitian yang sama lagi.

Tanggung Jawab Aparatur Pemerintah PUPR

Tanggung jawab aparat pemerintah PUPR dalam penanganan kerusakan jalan di Cipta Karya, Kota Pekanbaru meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan koordinasi. Tantangan yang dihadapi seperti keterbatasan anggaran dan kebutuhan untuk menjaga kualitas pekerjaan harus dikelola dengan baik melalui langkah-langkah perbaikan dan peningkatan. Dengan manajemen yang efektif dan transparan, pemerintah dapat memastikan bahwa penanganan kerusakan jalan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode review atau tinjauan pustaka. Untuk menunjang kegiatan penelitian, dokumentasi merupakan uraian teori, hasil, dan pembahasan penelitian lainnya yang diperoleh dari bahan referensi. Tinjauan pustaka adalah penilaian, rangkuman, dan pemikiran penulis terhadap suatu topik yang diambil

dari berbagai sumber perpustakaan, seperti artikel, buku, slide, atau informasi dari Internet. Tinjauan literature yang baik harus relevan, terkini, dan lengkap. Beberapa cara melakukan tinjauan pustaka antara lain landasan teori, tinjauan teori, dan tinjauan pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dari 9 artikel menjelaskan penerapan pembelajaran berdiferensiasi ditunjukkan pada Tabel 1.

Tabel 1. Analisis Sintesis Pencarian Literature

Nama NO	Nama Penulis	Nama Jurnal (Tahun, Vol, No, Hal)	Judul Artikel	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Unique, 2016)	JOM FISIP Vol. 11: Edisi I Januari - Juni 2024	Penanganan Kerusakan Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2019	Penelitian kualitatif	Jalan di kawasan Bangau sakti masih belum diperbaiki karena beberapa faktor utama. Pertama, terbatasnya anggaran pemerintah daerah berarti sangat sedikit dana yang dialokasikan untuk infrastruktur. Kedua, proses birokrasi yang panjang dan rumit seringkali memperlambat pelaksanaan proyek perbaikan jalan. Ketiga, letak geografis Bangau sakti yang terpencil dan sulit dijangkau menjadikan pengangkutan material dan peralatan menjadi tantangan tersendiri. Selain itu, salah satu alasan perbaikan jalan Bangau sakti adalah prioritas pemerintah kota yang bisa fokus pada kawasan yang lebih padat penduduknya. Akibatnya, masyarakat lokal harus menghadapi kerusakan jalan yang berdampak negatif terhadap aktivitas sehari-hari dan perekonomian lokal.
2	(Nisaa et al., 2023)	Jurnal JAPS Volume 5, nomor 1 April 2023	Perencanaan Perbaikan Infrastruktur Jalan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023	Penelitian Kualitatif	Dari beberapa sumber, penulis menemukan beberapa penyebab kerusakan jalan pada kasus ini pertama, karena adanya galian proyek Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik terpadu (SPALD-T) dan Sistem Pengadaan Air Minum (SPAM). Bahkan pada tahun 2022,

					<p>masyarakat telah mengadakan persoalan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Pekanbaru kepada Polda Riau melalui Tim Advokat Pejuang Keadilan (Tapak). Proyek IPAL ini ditargetkan tuntas pada tahun 2023 dengan total dana lebih dari 780M. Kedua, curah hujan yang tinggi sepanjang tahun 2022 menyebabkan genangan air hujan yang tidak tertampung lagi dalam drainase yang sudah penuh dengan sampah sampah dan endapan. Ketiga, tambang sulam yang dilakukan untuk memperbaiki jalan tidak bertahan lama. Keempat, terlambatnya melakukan rekondisi jalan bekas galian, seperti di Kecamatan Payung Sekaki. Kelima, kurangnya pemeliharaan jalan dari pemerintah maupun dari masyarakat, apalagi dalam menghadapi musim hujan.</p>
3	(Nilaatiet al., 2021)	Volume 5, no 5, Okt2021	Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Bone.	Penelitian kualitatif	<p>Ada beberapa faktor yang penulis temukan pada kasus ini yang pertama kurangnya penanganan oleh infrastruktur pemerintahan umum, yang kedua keterbatasan dana yang tersedia di anggaran pemerintah daerah tersebut, yang ketiga proses administratif dan birokrasi yang panjang dan rumit sehingga menjadi penghambat perbaikan jalan, keempat keterbatasan ketenaga kerjaan.</p>
4	Elisabeth , 2015)	Jom FISIP Vol 2 No. 1 Februari 2015	Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Toba samosir	Penelitian kualitatif	<p>Penelitian ini mengungkap bahwa kinerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Toba Samosir dalam pemeliharaan jalan dan jembatan dinilai kurang baik pada aspek responsivitas dan akuntabilitas, terutama karena kurangnya sarana, prasarana, dan pemantauan yang memadai. Hambatan utama kinerja meliputi kurangnya fasilitas, keterbatasan sumber daya manusia, persepsi masyarakat, dan kondisi alam yang sulit. Untuk meningkatkan</p>

				kinerja, direkomendasikan penambahan fasilitas dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta peningkatan kemampuan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pemeliharaan.	
5	(Lestari et al., 2023)	Jurnal multimedia dehasen, vol 2 no 3 juli 2023	Peran pemerintah dalam menanggulangi kerusakan infrastruktur jalan di desa bah tobu kecamatan dolok batu nanggar kabupaten simalungun	Penelitian Kuantitatif	Penelitian ini menemukan bahwa kerusakan infrastruktur jalan di Desa Bah Tobu, Kabupaten Simalungun, disebabkan oleh dua faktor utama Keterbatasan Anggaran: Dana yang terbatas menghambat pembangunan dan pemeliharaan jalan. Kurangnya Perhatian dari Pemerintah: Ada kurangnya perhatian dari pemerintah daerah dalam pemeliharaan infrastruktur, yang memperparah kondisi jalan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah segera menangani masalah ini untuk menghindari dampak negatif pada mobilitas dan keselamatan warga.
6	(Nur et al., 2020)	JIPAGS, Vol 3 Nomor 1 Januari 2019, 448-469	Kinerja Pelayanan Jalan Dan Jembatan Dalam Prespektif Pelayanan Publik Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tahun 2017.	Penelitian kualitatif	Berikut adalah hasil dari penelitian tersebut: Kinerja Pengelolaan Jalan dan Jembatan oleh Dinas PUPR Provinsi Banten dapat dinilai cukup baik secara umum. Terdapat beberapa perkembangan dan peningkatan terkait jalan dan jembatan, meskipun masih ditemui adanya kegagalan pembangunan dan keterlambatan. Dinas PUPR Provinsi Banten berupaya untuk responsif dalam menyelesaikan gugatan masyarakat, menyusun tanggapan perencanaan pembangunan, serta melaksanakan konstruksi dan pemeliharaan jalan sesuai anggaran dan tahapan. Faktor-faktor yang menghambat kinerja antara lain: Kurangnya sarana dan prasarana seperti alat berat untuk konstruksi/pemeliharaan jalan dan jembatan.

				Jumlah dan kualitas sumber daya manusia (pegawai Dinas PUPR) yang masih terbatas. Persepsi masyarakat terhadap konsistensi kinerja Dinas PUPR Faktor alam. Secara keseluruhan, penelitian ini mengevaluasi kinerja pengelolaan jalan dan jembatan oleh Dinas PUPR Provinsi Banten, dengan mengidentifikasi capaian positif serta area yang masih perlu ditingkatkan.	
7	(Kalengko ngan et al., 2019)	JURNAL REALTECH Vol. 15, No. 1, April 2019: 33-39 ISSN: 1907-0837	Aplikasi Online Pendataan Jalan Rusak di Dina PUPR Bidang Bina Marga Minahasa Utara.	Penelitian Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Minahasa Utara, Indonesia, sedang dikembangkan aplikasi online untuk pendataan jalan yang rusak. Aplikasi ini dibuat untuk membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan (PU/PR) bidang Bina Marga melakukan pendataan jalan rusak dan membantu masyarakat melaporkan jalan rusak. Metode Rapid Application Development digunakan untuk membangun aplikasi ini, yang menggunakan bahasa pemrograman PHP dan JavaScript.
8	(Rumate et al., 2023)	Lex Privatum Vol.XI No.2 Mar 2023	Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Jalan Atas Kerusakan Jalan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas.	Penelitian Kuantitatif	Sebagai penyelenggara jalan, pemerintah harus segera memperbaiki jalan yang rusak dan menempatkan tanda atau rambu di area tersebut. Penyelenggara jalan dapat dimintai pertanggungjawaban jika mereka lalai. Korban kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan berhak atas hal-hal berikut: 1. Mendapat bantuan dan perawatan dari pihak yang bertanggung jawab; 2. Mendapatkan ganti kerugian dari pemerintah sebagai penyelenggara jalan; dan 3. Mendapatkan santunan dari perusahaan asuransi. Peraturan perundang-undangan mengatur perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan. Oleh karena itu,

				jurnal ini membahas tanggung jawab penyelenggara jalan serta hak-hak korban kecelakaan jalan.
9	(Bamaze Jurnal IPDN za, 2021)	Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam Mengoptimalkan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Lampung Timur	Penelitian Kualitatif	Penelitian ini menganalisis kinerja Dinas PUPR Kabupaten Lampung Timur dalam pembangunan infrastruktur jalan. Metode penelitian kualitatif deskriptif menemukan bahwa: Kinerja responsivitas dan akuntabilitas aparatur Dinas PUPR sudah cukup baik. Namun masih ada kekurangan sarana, prasarana, dan sumber daya aparatur yang menghambat peningkatan pelayanan. Kesimpulannya, kinerja pegawai saat Work From Home belum maksimal karena kendala pemahaman teknologi, infrastruktur, dan keterbatasan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan secara remote.

Berdasarkan hasil analisis literature review dari 9 artikel jurnal mengenai bentuk pertanggungjawaban aparatur pemerintah PUPR terhadap penanganan kerusakan jalan, ada temuan signifikan yang dapat disimpulkan. Banyak sebagian besar penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif, untuk penelitian kualitatif peneliti dapat mendalami strategi pengawasan dalam bentuk pertanggungjawaban aparatur pemerintah PUPR terhadap penanganan kerusakan jalan terutama di Jalan Cipta Karya Kota Pekanbaru. Sedangkan penelitian kuantitatif disebabkan oleh dua faktor utama (1) keterbatasan Anggaran: Dana yang terbatas menghambat pembangunan dan pemeliharaan jalan. (2) kurangnya Perhatian dari Pemerintah: Ada kurangnya perhatian dari pemerintah daerah dalam pemeliharaan infrastruktur, yang memperparah kondisi jalan

Pemerintah memiliki tanggung jawab utama dalam penanganan kerusakan jalan di wilayahnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pemerintah melakukan identifikasi dan pemetaan titik-titik kerusakan jalan melalui inspeksi dan survei berkala di seluruh wilayah, kemudian Pemerintah juga menyusun perencanaan dan penganggaran yang komprehensif untuk kegiatan perbaikan, pemeliharaan, dan peningkatan kualitas jalan, dengan melakukan koordinasi dan pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan pekerjaan perbaikan jalan oleh kontraktor atau rekanan pemerintah. Pemerintah memastikan pertanggungjawaban dan transparansi penggunaan anggaran oleh kontraktor atau rekanan sehingga dana dapat dimanfaatkan secara optimal.

Pemerintah mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memantau kinerja penanganan kerusakan jalan. Partisipasi Masyarakat dalam Penanganan Kerusakan Jalan dilibatkan dalam proses pengawasan dan evaluasi penanganan kerusakan jalan di lingkungan mereka, Keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan dan evaluasi penanganan kerusakan jalan dapat meningkatkan efektivitas upaya perbaikan, karena masyarakat mengetahui kondisi jalan di lingkungannya. Masyarakat secara aktif memberikan masukan dan laporan terkait kondisi jalan yang rusak di wilayahnya kepada pemerintah. Masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan pemeliharaan jalan skala kecil secara swadaya, seperti membersihkan saluran tepi jalan atau melakukan tambal-sulam kerusakan ringan. Pemerintah mendorong dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam penanganan kerusakan jalan melalui sosialisasi, pelatihan, dan pemberian insentif.

Kendala dan Tantangan dalam Penanganan Kerusakan Jalan yang sering terjadi karena Keterbatasan anggaran pemerintah untuk pemeliharaan jalan secara berkala dan komprehensif, sehingga hanya dapat melakukan perbaikan jalan secara parsial. Koordinasi dan pengawasan yang kurang efektif antara pemerintah dan kontraktor/rekanan, sehingga kualitas hasil pekerjaan tidak sesuai harapan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam monitoring dan evaluasi penanganan kerusakan jalan, sehingga upaya perbaikan tidak berjalan optimal. Kerusakan jalan yang terjadi akibat faktor alam, seperti cuaca ekstrem dan bencana alam, serta intensitas lalu lintas yang tinggi, sehingga membutuhkan pemeliharaan yang lebih intensif. Kesulitan dalam memperoleh material dan sumber daya yang dibutuhkan untuk perbaikan jalan, terutama di daerah terpencil yang dapat menghambat upaya penanganan kerusakan jalan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dari 9 artikel jurnal, dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah menjalankan perannya dalam penanganan kerusakan jalan, namun masih terdapat beberapa kendala dan tantangan yang perlu diatasi. Kolaborasi antara pemerintah dan partisipasi masyarakat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penanganan kerusakan jalan. Pemerintah harus meningkatkan alokasi anggaran, koordinasi, dan pengawasan, serta mendorong partisipasi masyarakat secara optimal. Dengan upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan penanganan kerusakan jalan dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bamazeza, M. F. (2021). Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Dalam Mengoptimalkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Lampung Timur Asdaf Provinsi Lampung Program Studi Studi Administrasi Pemerintahan Daerah. *Jurnal PDN Jatinagor*, 1(1), 1–9.
- Elisabeth, M. (2015). Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dalam Pemeliharaan Jalan dan Jembatan di Kabupaten Toba Samosir. *Jom FISIP*, 2(1), 1–13.
- Kalengkongan, D. A., Kumenap, V. D., & Sitanayah, L. (2019). Aplikasi Online Pendataan Jalan Rusak Di Dinas Pu/Pr Bidang Bina Marga Minahasa Utara. *Jurnal Ilmiah Realtech*, 15(1), 33–39. <https://doi.org/10.52159/realtech.v15i1.79>
- Lestari, C. A., Ummah, K., Pratiwi, N. A., & Ivanna, J. (2023). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Desa Bah Tobu Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 2(3), 307–312. <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4023>
- Nilawati, Mahsyar, A., & Tahir, M. (2021). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Kerusakan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Bone. ... *Administrasi Publik (KIMAP)*, 2, 1859–1873. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index>
- Nisaa, F., Adlin, A., & Notatema Zebua, B. H. (2023). Perencanaan Perbaikan Infrastruktur Jalan Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru Tahun 2023. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 4(1), 17–25. <https://doi.org/10.46730/japs.v4i1.92>
- Nur, A. S., Sihabudin, A., & Syadzily, A. H. (2020). Kinerja Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Dalam Perspektif Pelayanan Publik Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Banten Tahun 2017. *JIPAGS (Journal of Indonesian Public Administration and Governance Studies)*, 3(1). <https://doi.org/10.31506/jipags.v3i1.5478>
- Rumate et al., 2023. (2023). *Pertanggung Jawaban Penyelenggaraan Jalan Atas Kerusakan Jalan yang Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas*. 4(1), 88–100.
- Uguy, C. (n.d.). Pengaruh Stres, Motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Pegawai : Studi Pada Pegawai Non Medis di RS Bhayangkara Mamado. *Riset Bisnis Dan Mnajemen*.
- Unique, A. (2016). *Penanganan Kerusakan Jalan Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Provinsi Riau Tahun 2019*. 11(0), 1–23.
- Wijayanti Wening. (2023). Moral Dan Etika Birokrasi Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(11), 48–58.